

**Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah
dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan Luwu Raya**

Author

Makmuralto¹ Mukhlis Sufri² Muhammad Arif³

Email

parangtambung99@gmail.com¹ mukhlis.sufri@umi.ac.id² muhammad.arif@umi.ac.id³

Afiliasi

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tingkat rasio kemampuan keuangan daerah Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, (2) Untuk mengetahui pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, (3) Untuk mengetahui pengaruh rasio kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, (4) Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, (5) Untuk mengetahui pengaruh rasio kemampuan dan rasio kemandirian keuangan daerah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan prosedur statistik yaitu dengan mengukur rasio dan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan program Eviews versi 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan keuangan daerah di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 berada pada tingkatan “kurang”, (2) Kemandirian keuangan daerah di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 berada pada tingkatan “instruktif”, (3) Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) berpengaruh (negatif) dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019, dan (5) Secara bersama-sama (simultan), rasio KKD dan KMD berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019.

Kata Kunci: Kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, PAD, pendapatan transfer, pertumbuhan ekonomi

Pendahuluan

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998, telah mengubah paradigma pengelolaan pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi menyebabkan adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelola keuangannya secara mandiri

(desentralisasi fiskal) agar kebijakan pengalokasian anggaran didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi penanda bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari sumber lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (Bratakusuma, 2003).

Hakikat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan maupun pengelolaan keuangan daerah agar semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi juga dalam hal kemampuan pengelolaan daerah. Menurut Suparmoko (2002), kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang bersangkutan, seberapa besar kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang mana merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintah di daerah. Adanya perbedaan sumber daya alam bagi setiap daerah akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah PAD yang akan diterima guna membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin besar PAD akan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber-sumber penerimaan lain seperti bantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi. Dalam APBD, sumber-sumber pembangunan pelaksana desentralisasi terdiri atas PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Aspek kemampuan dan kemandirian keuangan daerah perlu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pihak-pihak yang menghendaki adanya pemekaran wilayah di suatu provinsi/kabupaten tertentu. Salah satu wilayah yang selama ini menuntut pemekaran wilayah dan/atau pembentukan provinsi baru adalah Kawasan Luwu Raya. Kawasan Luwu Raya mencakup empat kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Masyarakat di keempat kabupaten/kota ini telah lama menuntut pemisahan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan dan menghendaki berdirinya provinsi baru yaitu Provinsi Luwu Raya.

Terkait PAD, dana perimbangan (sebagai salah satu komponen pendapatan transfer), dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya antara tahun 2015 hingga 2019, berdasarkan data BPS, secara umum kisarannya digambarkan sebagai berikut: Pertama, Kabupaten Luwu. PAD-nya 78,56-113,76 (miliar Rupiah), dana perimbangannya 839,13-1.043,48 (miliar Rupiah), dan pertumbuhan ekonominya 6,26-7,88 (%); Kedua, Kota Palopo. PAD-nya 92,27-167,30 (miliar Rupiah), dana perimbangannya 626,11-807,00 (miliar Rupiah), dan pertumbuhan ekonominya 6,47-7,52 (%); Ketiga, Kabupaten Luwu Utara. PAD-nya 84,67-141,00 (miliar Rupiah), dana perimbangannya 709,26-927,74 (miliar Rupiah), dan pertumbuhan ekonominya 6,67-8,39 (%); Keempat, Kabupaten Luwu Timur. PAD-nya 147,07-313,54 (miliar Rupiah), dana perimbangannya 694,83-932,43 (miliar Rupiah), dan pertumbuhan ekonominya 1,17-6,42 (%). Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 adalah sebesar 6,14%.

Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan karena upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan hal yang perlu dicermati untuk menilai sejauh mana potensi provinsi baru ini nantinya memiliki kemampuan menyejahterakan rakyatnya serta dapat

secara mandiri membiayai pembangunan di wilayahnya dan tidak terlalu bergantung secara fiskal kepada pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis “pengaruh”. Analisis pengaruh meneliti pola kausalitas atau fungsi sebab akibat dari sebuah variabel atau lebih terhadap variabel lain berlandaskan teori tertentu. Dengan kata lain, terdapat variabel yang secara teoretik memengaruhi (*independent variabel*) kemudian melihat efek dari variabel tersebut terhadap variabel lain yang dipengaruhi (*dependent variabel*). Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berasal dari data BPS dan BAPENDA di Kawasan Luwu Raya. Penelitian ini menggunakan metode analisa rasio dan analisa regresi linier berganda. Analisa rasio digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dan pola hubungan kemandirian keuangan daerah. Adapun analisa regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh rasio kemampuan dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam rangka membiayai pembangunan di daerah tersebut. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan antara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2002):

$$\text{Rasio KKD} = \frac{PAD_i}{TPD_i} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) menunjukkan pola hubungan kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan transfer (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) (Widodo, 2001). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio KMD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Eksternal}} \times 100\%$$

Untuk melihat pengaruh kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan analisis yang memasukkan variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel rasio kemampuan dan variabel rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah regresi linier berganda. Regresi linier jenis berganda digunakan oleh karena variabel independennya lebih dari satu. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GRW = \alpha_0 + \alpha_1 KKD + \alpha_2 KMD + ei$$

Dimana:

- GRW = Pertumbuhan Ekonomi
- KKD = Kemampuan Keuangan Daerah
- KMD = Kemandirian Keuangan Daerah
- $\alpha_1 - \alpha_2$ = Koefisien regresi
- α_0 = Konstanta
- ei = Variabel pengganggu

Selanjutnya, dalam menggunakan data panel, setidaknya ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian, yaitu F Test, Uji Hausman, serta Uji Langrange Multiplier (LM). Setelah ditemukan model yang paling tepat dalam analisis data panel tersebut, maka selanjutnya dilakukan dua hal: (a) pengujian model (uji statistik), dan (b) pengujian asumsi klasik.

Hasil dan Pembahasan

Tabulasi Data KKD (X1), KMD (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kawasan Luwu Raya Tahun 2015-2019

Tabel 1

Nama Kab/Kota	Tahun	Y	X1	X2
Palopo	2015	6.47	10.8	12.1
Palopo	2016	6.95	13.3	15.4
Palopo	2017	7.17	17.9	21.8
Palopo	2018	7.52	14.4	16.9
Palopo	2019	6.75	16.8	20.2
Luwu	2015	7.26	6.4	6.8
Luwu	2016	7.88	6.8	7.3
Luwu	2017	6.79	8.5	9.2
Luwu	2018	6.86	8.1	8.8
Luwu	2019	6.26	7.7	8.4
Luwu Utara	2015	6.67	9.9	10.9
Luwu Utara	2016	7.49	11.9	13.5
Luwu Utara	2017	7.6	9.1	9.9
Luwu Utara	2018	8.39	8.8	9.7
Luwu Utara	2019	7.11	9.3	10.3
Luwu Timur	2015	6.42	12.5	14.3
Luwu Timur	2016	1.58	12.5	14.3
Luwu Timur	2017	3.07	18.7	22.9
Luwu Timur	2018	3.39	17.5	22
Luwu Timur	2019	1.17	20.7	26.1

Rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) di Kawasan Luwu Raya diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2

No	Kab/Kota	Rasio KKD (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Palopo	10,8	13,3	17,9	14,4	16,8
2.	Luwu	6,4	6,8	8,5	8,1	7,7
3.	Luwu Utara	9,9	11,9	9,1	8,8	9,3
4.	Luwu Timur	12,5	12,5	18,7	17,5	20,7

Tingkatan kemampuan keuangan daerah Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3

No	Kab/Kota	Tingkatan KKD				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Palopo	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
2.	Luwu	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
3.	Luwu Utara	Sangat Kurang	Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
4.	Luwu Timur	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup

Rasio kemandirian keuangan daerah (KMD) di Kawasan Luwu Raya diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4

No	Kab/Kota	Rasio KMD (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Palopo	12,1	15,4	21,8	16,9	20,2
2.	Luwu	6,8	7,3	9,2	8,8	8,4
3.	Luwu Utara	10,9	13,5	9,9	9,7	10,3
4.	Luwu Timur	14,3	14,3	22,9	22,0	26,1

Tingkatan kemandirian keuangan daerah Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 5

No	Kab/Kota	Tingkatan KMD				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Palopo	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.
2.	Luwu	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.
3.	Luwu Utara	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.
4.	Luwu Timur	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Instruk.	Konsul.

Hasil regresi pengaruh rasio KKD dan KMD terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.578502	3.735328	2.028872	0.0619
KKD	0.080210	1.739593	0.046108	0.9639
KMD	-0.171470	1.247685	-0.137431	0.8926

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.775747	Mean dependent var		6.140000
Adjusted R-squared	0.695656	S.D. dependent var		2.079200
S.E. of regression	1.147040	Akaike info criterion		3.355571
Sum squared resid	18.41980	Schwarz criterion		3.654291
Log likelihood	-27.55571	Hannan-Quinn criter.		3.413884
F-statistic	9.685886	Durbin-Watson stat		2.529612
Prob(F-statistic)	0.000366			

Hasil regresi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R-Squared sebesar 0,775747. Hal tersebut berarti bahwa sekitar 77,5 persen variasi variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dapat dijelaskan oleh variasi independen (KKD dan KMD). Sisanya yaitu sebesar 22,5 persen dijelaskan oleh variabel variasi lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan sangat baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh KKD dan KMD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019.

Nilai koefisien regresi variabel KKD mempunyai tanda positif dan besarnya adalah 0.080210. Nilai t hitung variabel KKD sebesar 0,046108. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ untuk uji dua pihak, maka diperoleh t tabel sebesar 2,110. Dengan demikian nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel, yaitu $0,046108 < 2,110$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Probabilitasnya yang sebesar $0,9639 > 0,05$ berarti bahwa nilainya tidak signifikan.

Nilai koefisien regresi variabel KMD mempunyai tanda negatif dan besarnya adalah -0.171470. Nilai t hitung variabel KMD sebesar -0.137431. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ untuk uji dua pihak, maka diperoleh t tabel sebesar -2,110. Dengan demikian nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel, yaitu $-0.137431 > -2,110$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Probabilitasnya yang sebesar $0,8926 > 0,05$ berarti bahwa nilainya tidak signifikan.

Sementara itu, nilai F hitung yang diperoleh dari regresi model adalah sebesar 9.685886. Dengan menggunakan F tabel $\alpha = 5\%$, maka diperoleh F tabel sebesar 3,55.

Dengan demikian, nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu $9.685886 > 3,55$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, data simultan. Probabilitasnya yang sebesar $0,000366 < 0,05$ berarti bahwa nilainya signifikan.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan meskipun nilainya relatif kecil. Secara rata-rata Kabupaten Luwu rasio KKD-nya adalah yang paling rendah (7,5%) dibanding tiga kabupaten/kota yang lain, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Luwu Utara (9,8%), Kota Palopo (14,6%), dan Kabupaten Luwu Timur (16,4%). Kabupaten Luwu Timur memiliki rasio KKD paling baik di antara tiga kabupaten/kota yang ada, bahkan menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang rasio KKD-nya mencatat nilai “Cukup”, yaitu pada tahun 2019. Secara rata-rata rasio KKD Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 adalah sebesar 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya masih berada dalam skala interval 0,00% - 20,00%, yaitu pada tingkatan “Kurang”. Hal ini diakibatkan oleh Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Luwu Raya masih relatif kecil dibanding total pendapatan daerah. Dengan kata lain, PAD masih kurang memadai dalam menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan meskipun nilainya relatif kecil. Secara rata-rata Kabupaten Luwu rasio KMD-nya adalah yang paling rendah (8,1%) dibanding tiga kabupaten/kota yang lain, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Luwu Utara (10,9%), Kota Palopo (17,3%), dan Kabupaten Luwu Timur (19,9%). Kabupaten Luwu Timur memiliki rasio KMD paling baik di antara tiga kabupaten/kota yang ada, bahkan menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang rasio KMD-nya mencatat nilai “Konsultatif”, yaitu pada tahun 2019. Secara rata-rata rasio KMD Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 adalah sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya masih berada dalam skala interval 0% - 25%, yaitu pada tingkatan “Instruktif”. Hal ini diakibatkan oleh Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Luwu Raya masih relatif kecil dibanding pendapatan transfer. Dengan kata lain, dalam hal kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya masih kurang mandiri secara keuangan dan sangat bergantung pada pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Dalam pengujian parsial (Uji t) ditemukan bahwa nilai koefisien regresi variabel KKD mempunyai tanda positif dan besarnya adalah 0.080210. Nilai t hitung variabel KKD sebesar 0,046108 lebih kecil daripada nilai t tabel, yaitu $0,046108 < 2,110$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan data dinyatakan “tidak signifikan” karena probabilitas t -Statistiknya yaitu sebesar $0,9639 > 0,05$. H_0 ialah hipotesis bahwa rasio KKD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara H_1 adalah hipotesis bahwa rasio KKD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka penelitian ini menyatakan bahwa rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Warohmah (2017) bahwa rasio kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengujian parsial (Uji t) ditemukan bahwa nilai koefisien regresi variabel KMD mempunyai tanda negatif dan besarnya adalah -0.171470. Nilai t hitung variabel

KMD sebesar -0.137431 lebih kecil daripada nilai t tabel, yaitu $-0.137431 > -2,110$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan data dinyatakan “tidak signifikan” karena probabilitas t -Statistiknya yaitu sebesar $0,8926 > 0,05$. H_0 ialah hipotesis bahwa rasio KMD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara H_1 adalah hipotesis bahwa rasio KMD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka penelitian ini menyatakan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) berpengaruh (negatif) dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2016) dan Kumpangpune (2019) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengujian simultan atau bersama-sama (Uji F) ditemukan bahwa nilai F hitung yang diperoleh dari regresi model adalah sebesar 9.685886 lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu $9.685886 > 3,55$. Maka H_0 ditolak, H_1 diterima, dan data dinyatakan “signifikan” karena probabilitas F-Statistiknya yaitu sebesar $0,000366 < 0,05$. H_0 ialah hipotesis bahwa rasio KKD dan KMD secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara H_1 adalah hipotesis bahwa rasio KKD dan KMD secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka penelitian ini menyatakan bahwa rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) secara simultan berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Risyanto (2015) bahwa secara simultan rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Simpulan dan Saran

Kemampuan keuangan daerah di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 masih tergolong rendah, yaitu dengan tingkatan “kurang”, berdasarkan rasio KKD yang hanya sebesar $11,2\%$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya masih kurang mampu dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di kawasan tersebut. Kemandirian keuangan daerah di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019 masih tergolong rendah, yaitu dengan tingkatan “instruktif”, berdasarkan rasio KMD yang hanya sebesar 14% . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya masing kurang mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di kawasan tersebut, dan masih sangat tergantung kepada dana dari pusat dan provinsi. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Artinya, kenaikan maupun penurunan satu satuan dari KKD tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi KMD-nya tetap. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) berpengaruh (negatif) dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Artinya, kenaikan satu satuan dari KMD akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan, dengan asumsi KKD-nya tetap. Secara bersama-sama (simultan), rasio KKD dan KMD berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Luwu Raya tahun 2015-2019. Artinya, kenaikan maupun penurunan secara simultan satu satuan dari KKD dan KMD akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya harus melakukan upaya yang maksimal untuk memperoleh dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui usaha-usaha seperti: (a) Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara optimal sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku; (b) Perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerah; (c) Melakukan langkah-langkah guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah; (d) Penciptaan dan peningkatan nilai tambah dalam perekonomian; (e) Menggali objek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah; (f) Memperbaiki dan mengoptimalkan ketentuan tarif sesuai dengan peraturan yang ada; (g) Memberikan fasilitas dan kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada serta dampak lingkungannya; dan (h) Pengembangan jaringan kerja sama antardaerah untuk maksimalisasi PAD. Perlunya masyarakat di Kawasan Luwu Raya untuk mendukung dan mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam hal kepatuhan dan kedisiplinan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga pemerintah daerah di Kawasan Luwu Raya dapat meningkatkan PAD-nya agar kinerja keuangannya mampu dan mandiri dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

Referensi

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Unit Percetakan dan Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Luwu Dalam Angka 2016*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu, Belopa.
- _____. 2016. *Luwu Timur Dalam Angka 2016*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu Timur, Malili.
- _____. 2016. *Luwu Utara Dalam Angka 2016*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu Utara, Masamba.
- _____. 2016. *Palopo Dalam Angka 2016*. Penerbit BPS Kota Palopo, Palopo.
- _____. 2020. *Luwu Dalam Angka 2020*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu, Belopa.
- _____. 2020. *Luwu Timur Dalam Angka 2020*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu Timur, Malili.
- _____. 2020. *Luwu Utara Dalam Angka 2020*. Penerbit BPS Kabupaten Luwu Utara, Masamba.
- _____. 2020. *Palopo Dalam Angka 2020*. Penerbit BPS Kota Palopo, Palopo.
- Boediono. 2018. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama, Cet. IX. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

- Bratakusuma, Sholikin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kumpangpune, Noni, dan David P. E. Saerang, dan Daisy S.M. Engka. 2019. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 20. No. 20, Juli.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Penerbit YKPN. Yogyakarta.
- Nurulita, Suci, dan Hamdani Arifulsyah dan Yefni. 2018. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau”. *Jurnal Benefita*, 3 Oktober, hal. 336-356.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Warohmah, Indah, dan Aji Sofyan Effendi, dan Juliansyah Roy. 2017. “Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol. 2, No. 3.
- Zhang Tao dan Zou Heng Fu. 1998. “Fiscal Decentralization: Public Spending and Economic Growth in China”. *Journal of Public Expenditure*, Ed. 67, hal. 221-240.
- Zulyanto, Aan. 2010. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”. Universitas Diponegoro, Semarang.